



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang : 2008-2009
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : --
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan : Direktur Migrant Care
Sifat Rapat : **Terbuka**
Hari/tanggal : Senin, 8 Juni 2009
Pukul : 16.00 WIB – selesai
Acara : Penjelasan Direktur Migrant Care Mengenai Perkembangan Masalah TKI di Malaysia.
Ketua Rapat : dr. Kasmawati Tahir Z. Basalamah/Wakil Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat : Tri Udiartiningrum/Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1
Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Anggota yg hadir : orang anggota dari 50 Anggota, orang anggota ijin orang

I. PENDAHULUAN

Rapat dibuka pukul 16.50 WIB setelah kuorum terpenuhi sebagaimana peraturan Tata Tertib DPR RI pasal 99 ayat (1), rapat dinyatakan *terbuka* untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Migrant Care menyampaikan permasalahan yang dihadapi para TKI yang bekerja di Malaysia, yaitu :
 - a. Malaysia merupakan Negara terbesar yang menerima buruh Migrant Indonesia sebesar 2,4 juta orang. Malaysia masih menerapkan *labor market flexibility* dan trend buruh murah terutama bagi PRT migrant dan buruh migrant Indonesia yang tidak berdokumen.

- b. Masih banyaknya terjadi kekerasan yang menimpa para TKI. Pada tahun 2007, buruh migrant yang meninggal di Malaysia mencapai 653 orang. Tahun 2008 jumlah TKI yang meninggal mencapai 513 orang dan pada bulan Januari s/d Mei 2009 jumlah TKI yang meninggal telah mencapai 71 orang.
 - c. Maraknya unsur *trafficking* dalam penempatan buruh migrant Indonesia di Malaysia serta makin kuatnya dikotomi antara buruh migrant Indonesia dengan buruh migrant dari Negara lain. Buruh migrant Indonesia sangat tidak mempunyai posisi tawar yang baik dibandingkan buruh migrant dari Negara asing yang lain.
 - d. Belum Nampak adanya korelasi positif antara penempatan buruh migrant Indonesia ke Malaysia dengan tingkat kesejahteraan buruh migrant dan anggota keluarganya dan buruh migrant Indonesia rentan menjadi korban PHK di Malaysia dalam situasi krisis global.
 - e. Sampai dengan saat ini, Migrant Care sedang menangani 400 orang di PHK oleh Perusahaan Shin Etsu Sdn Bhd. 400 orang tersebut belum mendapatkan pesangon secara utuh dan belum mendapat asuransi di Indonesia. Sebagian dari korban PHK yang berasal dari Kebumen, Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan hak atas asuransi, dengan mendatangi LBH Yogyakarta, PT. Mutiara Karya Mitra Cabang Yogyakarta, Disnakertrans Kebumen dan BNP2TKI. Pada tanggal 1 Juni 2009 telah mendatangi Dirjen PPTKILN Depnakertrans.
 - f. Banyaknya buruh migrant Indonesia yang tidak berdokumen telah dideportasi oleh pihak pemerintah Malaysia. Dari Januari s/d Juni 2009 jumlah yang telah dideportasi mencapai 5000 orang.
 - g. Banyaknya buruh Migrant di Malaysia yang tidak dapat melaksanakan hak politiknya. Hal ini tercermin dari DPT Pemilu Legislatif, dimana jumlah buruh migrant hanya berjumlah 1.475.847 dan sama sekali tidak mencerminkan jumlah buruh migrant Indonesia yang mencapai 6,5 juta orang.
 - h. Migrant care juga melaporkan kasus yang menimpa ibu Sumasri, TKI yang berasal dari Blitar, Jawa Timur, yang bekerja di Malaysia sejak 14 Mei 2007. Pada tanggal 25 Mei 2009 ibu Sumasri pulang ke rumah dalam kondisi depresi/stress, dengan membawa surat pengantar dari BNP2TKI yang berisikan bahwa keluarga agar mengambil barang-barang milik Sumasri yang masih berada di Terminal IV Bandara Soekarno Hatta.
2. Buruh Migrant berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia sangat lemah dalam memberikan respon dan perlindungan terhadap penderitaan TKI di luar negeri.
 3. Komisi IX DPR RI perlu diberikan data-data dan bukti tertulis terhadap berbagai fakta yang terjadi di Malaysia, sehingga hal-hal yang menjadi permasalahan para TKI ditanyakan kepada Menakertrans dan Kepala BNP2TKI saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan pihak Pemerintah.
 4. Berbagai permasalahan yang terjadi yang diderita TKI menunjukkan tidak adanya upaya maksimal dari BNP2TKI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. BNP2TKI cenderung hanya mencari kewenangan yang lebih luas, namun mengabaikan tugas pokoknya dalam mengurus TKI. Pemerintah Indonesia harus member sanksi yang tegas terhadap PJTKI yang telah melakukan penipuan terhadap TKI. Pemerintah Indonesia harus mendesak pemerintah Malaysia untuk memberikan hak-hak normatif TKI.

III. CATATAN PENTING

1. Komisi IX DPR RI memberikan perhatian khusus dan serius terhadap berbagai masalah yang dialami oleh para TKI yang bekerja di Malaysia.
2. Komisi IX DPR RI mengagendakan Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat dengan BNP2TKI, Depnakertrans, Deplu, PJTKI dan Migrant Care dan melakukan kunjungan lapangan ke Terminal IV Bandara Soekarno Hatta.

Rapat ditutup pukul 17.45 WIB.

Jakarta, 8 Juni 2009
PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



dr. KASMAWATI TAHIR Z. BASALAMAH